

**LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
TAHUN 2023**



**PT. Bank Perkreditan Rakyat
POLLUX**

Kantor :
Jl. Dr. Cipto No. 184 Semarang
Telp : (024) 8448707 Facs. (024) 8448703
www.polluxbank.co.id

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : Jl. Dr. Cipto No. 184 Semarang

Nomor Telepon : 0248448707

Penjelasan Umum : Bagi PT. BPR Pollux, penerapan tata kelola perusahaan yang baik bukan sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan, namun merupakan elemen fundamental. Manajemen meyakini bahwa dengan menerapkan tata kelola yang baik akan mampu meningkatkan nilai perusahaan. Komitmen ini didukung penuh oleh seluruh jajaran Manajemen dan karyawan PT. BPR Pollux. Komitmen Bank untuk mengimplementasikan penerapan tata kelola bertujuan untuk : a. Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan Bank b. Meningkatkan kinerja Bank, efisiensi dan pelayanan kepada stakeholder c. Menarik minat dan kepercayaan nasabah.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Binarso Hariadi	Direktur Utama	Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Bank sesuai dengan kewenangan yang tertuang di dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi Bank. Menindaklanjuti rekomendasi audit intern dan audit ekstern. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. Membuat kebijakan yang bersifat strategis bidang kepegawaian kepada pegawai. Mengungkapkan fakta yang material tentang kondisi Bank agar tidak menyesatkan informasi tentang keadaan atau kondisi Bank. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai UU dan Anggaran Dasar. Mendorong pelaksanaan budaya kepatuhan serta penerapan pedoman perilaku dan kode etik kepada segenap jajaran organisasi. Tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut: Proyek bersifat khusus, Didasari oleh kontrak kerja yang jelas dan Konsultan adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus. Direktur Utama bersama-sama dengan seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Direksi dapat mengangkat baik perorangan maupun 1 (satu) orang dalam bentuk komite dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan usaha tertentu Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Audit Intern Bank, Auditor Eksternal, hasil Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Rinny Listianna	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Bank sesuai dengan kewenangan yang tertuang di dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi Bank.Menindaklanjuti rekomendasi audit intern dan audit ekstern.Menyediakan data dan informasi yang akurat,relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. Membuat kebijakan yang bersifat strategis bidang kepegawaian kepada pegawai.Mengungkapkan fakta yang material tentang kondisi Bank agar tidak menyesatkan informasi tentang keadaan atau kondisi Bank.Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai UU dan Anggaran Dasar.Mendorong pelaksanaan budaya kepatuhan serta penerapan pedoman perilaku dan kode etik kepada segenap jajaran organisasi.Tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:Proyek bersifat khusus,Didasari oleh kontrak kerja yang jelas dan Konsultan adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.Direktur Utama bersama-sama dengan seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.Direksi dapat mengangkat baik perorangan maupun 1 (satu) orang dalam bentuk komite dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan usaha tertentu Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Audit Intern Bank,Auditor Eksternal,hasil Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris mengenai penyampaian action plan penyelesaian kredit bermasalah yang disampaikan kepada OJK selambat lambatnya tanggal 10 tiap bulannya.Direksi telah menyusun dan mengkinikan Pedoman APU PPT PPPSPM sesuai POJK terbaru. Direksi telah menindaklanjuti penyelesaian kredit bermasalah,sehingga untuk periode ini terdapat 10 (sepuluh) debitur NPL yang melakukan pelunasan dan 1 (satu) nasabah hapus buku yang membayar tunggakan pokok dan bunga.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Nico Purnomo	Komisaris Utama	<p>a. Dewan Komisaris wajib melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen. b. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan terkait pelaksanaan Good Corporate Governance, Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perbankan, Undang-undang Pasar Modal, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. c. Dewan Komisaris berhak memeriksa buku-buku, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Bank, dokumen-dokumen dan kekayaan Bank serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. d. Dewan Komisaris setiap waktu dapat memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota direksi apabila anggota direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan aturan perundang-undangan yang berlaku. e. Dewan Komisaris untuk sementara waktu diwajibkan untuk mengurus bank apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara. f. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memberikan nasihat, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategik. g. Dewan Komisaris berhak memberikan persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank. h. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. i. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Dewi Anggreini	Komisaris	a. Dewan Komisaris wajib melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen. b. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan terkait pelaksanaan Good Corporate Governance, Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perbankan, Undang-undang Pasar Modal, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. c. Dewan Komisaris berhak memeriksa buku-buku, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Bank, dokumen-dokumen dan kekayaan Bank serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. d. Dewan Komisaris setiap waktu dapat memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota direksi apabila anggota direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan aturan perundang-undangan yang berlaku. e. Dewan Komisaris untuk sementara waktu diwajibkan untuk mengurus bank apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara. f. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memberikan nasihat, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategik. g. Dewan Komisaris berhak memberikan persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank. h. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. i. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Rekomendasi Kepada Direksi

1. Merekomendasikan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik KUMALAHADI, KUNCARA, SUGENG PAMUDJI dan Rekan dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan pada PT. BPR POLLUX untuk Tahun Buku 2023. ; 2. Memastikan Bank telah melaksanakan pelatihan penerapan Program APU PPT kepada seluruh karyawan secara berkesinambungan ; 3. Memastikan Direksi telah menyusun dan mengkinikan Pedoman APU PPT PPPSPM sesuai POJK terbaru No 8 tahun 2023.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

tidak terdapat komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi BPR Pollux tidak memiliki saham pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

masing-masing anggota Direksi BPR Pollux tidak memiliki saham pada BPR Pollux maupun di perusahaan lain.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Rinny Listianna	Rinny Listianna - Direktur	tidak ada	tidak ada
2	Binarso Hariadi	Binarso Hariadi - Direktur Utama	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Masing-masing anggota Direksi BPR POLLUX tidak memiliki hubungan keuangan satu sama lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Binarso Hariadi	Binarso Hariadi - Direktur Utama	tidak ada	tidak ada
2	Rinny Listianna	Rinny Listianna - Direktur - Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Masing-masing anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga terhadap anggota Direksi lain dan Pemegang Saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Nico Purnomo	4.860.000.000	37,38

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Komisaris atas nama Dewi Anggreini tidak memiliki saham pada BPR Pollux

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Nico Purnomo	PT Pollux Properti Indonesia TBK	85,00
2	Nico Purnomo	PT Nakula Investama Indonesia	99,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Komisaris atas nama Dewi Anggreini tidak memiliki saham pada BPR Pollux , BPR lain maupun di perusahaan lainnya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Nico Purnomo	Nico Purnomo	tidak ada	Luciana - Ibu kandung, Dewi Susanti - Kakak kandung, Po Wiwiek Purnomo - Adik Kandung
2	Dewi Anggreini	Dewi Anggreini	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris Utama, Sdr. Nico Purnomo memiliki hubungan keuangan dengan pemegang Saham lainnya, namun tidak terdapat hubungan keuangan terhadap anggota Dewan Komisaris lainnya dan Anggota Direksi. Anggota Dewan Komisaris Sdri. Dewi Angreini tidak memiliki hubungan keuangan terhadap Anggota Dewan Komisaris lain, Anggota Direksi dan Pemegang Saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Nico Purnomo	tidak ada	tidak ada	Luciana - Ibu kandung, Dewi Susanti - Kakak kandung, Po Wiwiek Purnomo - Adik Kandung
2	Dewi Anggreini	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris Utama, Sdr. Nico Purnomo memiliki hubungan keluarga dengan pemegang Saham lainnya, namun tidak terdapat hubungan keluarga terhadap anggota Dewan Komisaris lainnya dan Anggota Direksi. Anggota Dewan Komisaris Sdri. Dewi Angreini tidak memiliki hubungan keluarga terhadap Anggota Dewan Komisaris lain, Anggota Direksi dan Pemegang Saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	384000000	2	258000000
2	Tunjangan	2	30000000	2	12000000
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		414000000		270000000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	tidak ada	tidak ada
2	Transportasi	Mobil Dinas Pribadi	tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan	BPJS Kesehatan
4	Fasilitas lainnya	Komunikasi	Komunikasi

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Fasilitas lain bagi Direksi adalah berupa mobil dinas, tunjangan komunikasi dan Asuransi Kesehatan, sedangkan fasilitas lain untuk Komisaris hanya berupa Asuransi kesehatan dan tunjangan komunikasi. Untuk Komisaris Utama hanya mendapatkan tunjangan lain berupa tunjangan komunikasi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,26	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,37	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,20	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,66	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,88	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	20-03-2023	2	Rencana bisnis , isu strategis, dan evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan evaluasi rencana bisnis BPR
2	20-06-2023	2	Rencana bisnis , isu strategis, dan evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan evaluasi rencana bisnis BPR
3	11-09-2023	2	Rencana bisnis , isu strategis, dan evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan evaluasi rencana bisnis BPR
4	17-11-2023	2	Rencana bisnis , isu strategis, dan evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan evaluasi rencana bisnis BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama periode tahun 2023, telah diselenggarakan rapat kerja secara berkala Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) kali.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Nico Purnomo	0	4	100,00
2	Dewi Anggreini	0	4	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris Utama berdomisili di luar provinsi, yaitu di Jakarta. Sehingga frekuensi kehadiran (fisik) Ybs selama tahun 2023 tidak ada, dan rapat dilakukan secara telekonferensi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama periode tahun sebelumnya dan tahun 2023 tidak terdapat penyimpangan internal.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

selama periode tahun 2023, tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh BPR Pollux

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	Harry A Sutopo	Direktur Utama	Hariyanto	Direktur Utama	pinjaman kredit	50	telah sesuai dengan prosedur bank
2	Harry A Sutopo	Direktur Utama	Hariyanto	Direktur Utama	pinjaman kredit	160	telah sesuai dengan prosedur bank
3	Harry A Sutopo	Direktur Utama	Hariyanto	Direktur Utama	pinjaman kredit	150	telah sesuai dengan prosedur bank
4	Lie Jemmy	Direktur Utama	Hariyanto	Direktur Utama	pinjaman kredit	82	telah sesuai dengan prosedur bank
5	Po Sun Kok	suami dari Luciana pemegang saham	Hariyanto	Direktur Utama	Sewa Gedung	12	telah sesuai dengan prosedur bank
6	Po Sun Kok	suami dari Luciana pemegang saham	Binarso Hariadi	Direktur Utama	Sewa Mobil	4	telah sesuai dengan prosedur bank
7	Po Sun Kok	suami dari Luciana pemegang saham	Binarso Hariadi	Direktur Utama	Sewa Mobil	3	telah sesuai dengan prosedur bank

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Untuk periode tahun 2023 terdapat Tujuh transaksi yang mengandung benturan kepentingan dari sebelumnya 9 (sembilan) transaksi, antara lain : sebanyak 4 (empat) fasilitas kredit pihak terkait dan 3 (tiga) sewa menyewa mobil dan gedung. Pada periode ini 2 (dua) fasilitas kredit telah lunas. Semua transaksi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk Pengambil keputusan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan adalah saat Pengurus lama masih menjabat, yaitu Sdr. Hariyanto (Direktur Utama sebelum kepengurusan yang baru), namun untuk transaksi sewa menyewa mobil yang periodenya setahun, pengambil keputusannya telah diubah ke Pejabat yang baru (Sdr. Binarso Hariadi)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Pollux

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

selama periode laporan tidak terdapat kegiatan pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

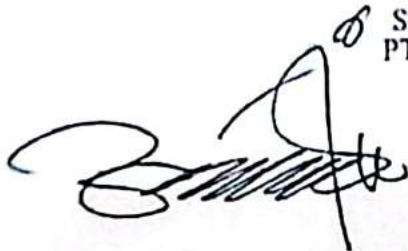
Nama BPR	: PT BPR Pollux
Posisi Laporan	: 31-12-2023
Alamat	: Jl. Dr. Cipto No. 184 Semarang
Nomor Telepon	: (024)-8448707
Modal Inti BPR	: 6.055.703.255,00
Total Aset BPR	: 28.215.803.426,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,8
Peringkat Komposit	: 1
Analisis	: Berdasarkan hasil penilaian sendiri tentang Penerapan Tata Kelola PT BPR Pollux per 31 Desember 2023, maka disimpulkan bahwa nilai komposit BPR Pollux adalah sebesar 1,8 dengan kriteria predikat komposit Baik. Nilai komposit masih sama dengan nilai periode tahun sebelumnya. secara keseluruhan bank telah menjalankan tata kelola dengan baik. seperti telah terpenuhinya jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris, terpenuhinya Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT dan Audit Intern. Rapat Direksi dan Dewan Komisaris telah terselenggara secara efektif dan efisien, dan hasil rapat telah didokumentasikan dengan baik dalam notulen rapat. Penugasan Audit Eksternal telah dilengkapi dengan Surat Penugasan dan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor akuntan Publik telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan. Pelaksanaan audit atas laporan keuangan BPR telah dilakukan oleh Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. BPR telah menyampaikan laporan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

**PERSETUJUAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR POLLUX
TAHUN 2023**

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Pollux tahun laporan 2023 disusun sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, yang telah mengungkapkan aspek Transparansi Penerapan Tata Kelola dan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*).

Dengan disusunnya Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada *Stakeholder* sebagai bentuk pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggungjawaban dan kewajaran BPR.

Semarang, 9 Januari 2024
PT. Bank Perkreditan Rakyat
POLLUX



Binarso Hariadi, SE., M.Si
Direktur Utama



Rinny Listianna, SE
Direktur Operasional & YMFK



Dr. Nico Purnomo
Komisaris Utama



Dewi Anggreini, SE
Komisaris